

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang mengguncang dunia terutama negara-negara berkembang pada pertengahan tahun 1997 yang diawali dengan terdepresiasinya mata uang suatu negara dengan mata uang Dollar Amerika memberikan dampak besar ke seluruh aspek kehidupan terutama aspek bisnis perusahaan. Akibatnya bisnis perusahaan terpuruk dalam kancah perdagangan termasuk runtuhnya kinerja perusahaan-perusahaan. Hal ini juga dialami oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi adalah lemahnya *Corporate Governance* dengan adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak manajer perusahaan.

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (*The World Bank*, 1998, dalam Oktapiyani, 2009). Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. menunjukkan bahwa variabel *corporate*

*governance* yang diterapkan dalam suatu negara lebih mampu menjelaskan luasnya depresiasi mata uang dan menurunnya kinerja pasar modal di negara-negara berkembang dibandingkan variabel-variabel makroekonomika pada periode krisis.

*Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi isu yang hangat dan menarik perhatian bagi para ekonom dan para pelaku bisnis di seluruh dunia belakangan ini. Sejak adanya krisis *finansial* di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis *finansial* Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia. Hal ini disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager *et al.* 2003)

Permasalahan *Corporate Governance* mencuat menjadi perhatian dunia setelah terungkapnya skandal keuangan (misalnya, Livent Inc, Corel Corporation, dan Nortel) di seluruh dunia dan runtuhnya lembaga-lembaga besar di Amerika Serikat (misalnya, Enron, World Com, Commerce Bank dan XL Holidays) telah menggoyahkan kepercayaan investor dalam pasar modal dan efektivitas praktek tata kelola perusahaan yang ada dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Gill dan Mathur, 2011). Hal ini memiliki dampak negatif pada nilai pasar per lembar

saham dan konsekuensinya terhadap keseluruhan nilai perusahaan. Dalam skandal ini, berbagai laporan percaya bahwa dewan komisaris dan komite perusahaan tidak memiliki pengawasan yang baik pada manajemen.

Cornett, *et al.* (2006) mengungkapkan kajian tentang *corporate governance* yang terus meningkat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar lain seperti halnya skandal *Tyco*, *Merck*, *Global Crossing* dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Perusahaan Enron (2001) dan WorldCom (2002), contohnya, memiliki non-eksekutif direktur ketika bencana itu datang. Maknanya, konsep lama *corporate governance* di Amerika tidak berdaya melindungi perusahaan-perusahaan tersebut dari kebangkrutan (Atkins 2003). Akibatnya, skandal perusahaan ini dipublikasikan dengan baik bersama dengan krisis keuangan Asia pada tahun 1997 yang telah menegaskan pentingnya praktik *good corporate governance* untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Mokhtar *et al.* 2009).

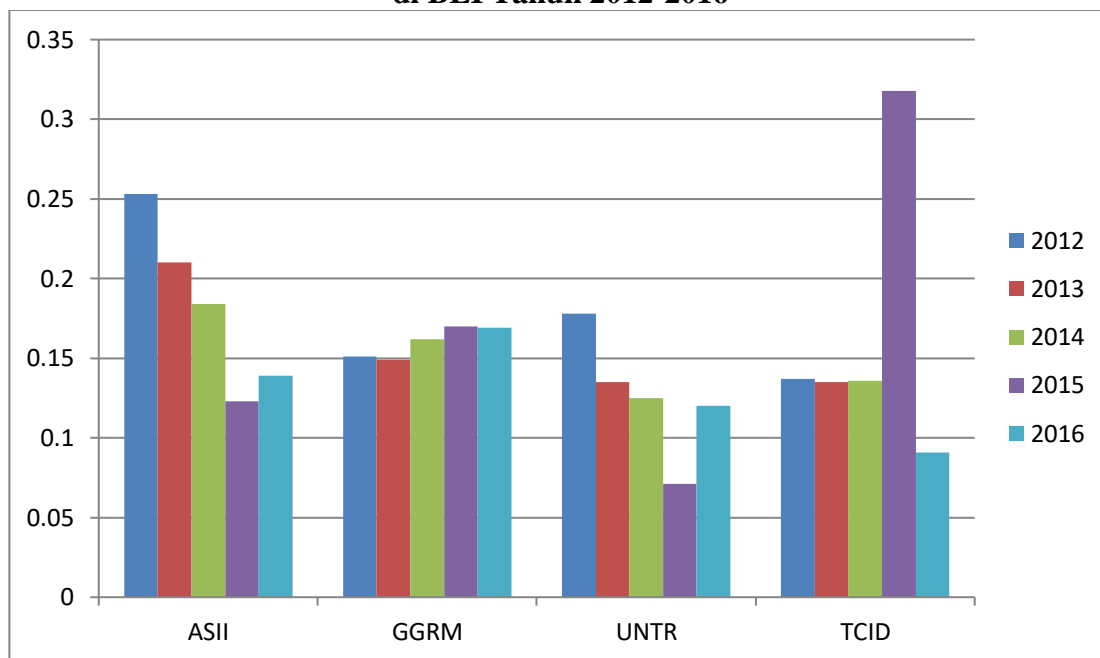
Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan (Darmawati *et al.* 2004). Jika suatu perusahaan memiliki kepercayaan dari investor, maka para investor dan *stakeholders* lainnya tidak akan ragu untuk melakukan

investasi yang akan menyebabkan nilai perusahaan akan meningkat (Che Haat, *et al.* 2008). Pengukuran suatu kinerja perusahaan yang baik maupun buruk dapat dilihat dari peningkatan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja suatu perusahaan di masa lampau, serta prospeknya di masa yang akan datang (Sukamulja, 2004). Kinerja perusahaan yang buruk dikarenakan tidak tercapainya efisiensi pasar sehingga peluang bisnis banyak yang hilang, sedangkan masalah keuangan pada perusahaan tersebut akan menyebar dengan sangat cepat ke perusahaan lain, karyawan, kreditor, pemerintah, konsumen, maupun *stakeholders* lainnya (Che Haat, *et al.* 2008). Para pemegang saham mengharapkan manajemen perusahaan bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan dan setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan para pemegang sahamnya serta sumber ekonomi yang digunakan untuk kepentingan pertumbuhan nilai perusahaan (Darmawati, *et al.* 2005), tetapi seringkali manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak lain di dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan tersebut.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh beberapa pihak independen seperti CLSA, Mc Kinsey, Standar & Poors, mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, posisi Indonesia masih berada di kelompok terbawah (*bottom quartile*).

Saat ini perkembangan *corporate governance* di Indonesia terus berkembang dengan baik tetapi akibat lemahnya sistem politik, pelaksanaan dan budaya *corporate governance* mempengaruhi perkembangan *corporate governance* di Indonesia, laporan tentang penerapan *good corporate governance* yang diterbitkan oleh CLSA (2012). Berikut adalah data rata-rata ROE Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016:

**Tabel 1.1**  
**Rata-rata ROE Perusahaan Manufaktur**  
**di BEI Tahun 2012-2016**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah tahun 2018)

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan yang dihitung dengan proporsi GCG mempunyai pengaruh positif terhadap terhadap kinerja perusahaan (ROE). Tahun 2012 saat GCG perusahaan ASII berada diangka

0,253 menjadi kenaikan tertinggi perusahaan manufaktur saat ditahun 2012. Dan pada tahun 2015 GCG perusahaan TCID berada diangka 0,318 menjadi skor tertinggi GCG pada periode terkait yang mengalahkan skor GCG perusahaan ASII tahun 2012 sebesar 0,253. Dan mengalami penurunan di tahun berikutnya tahun 2016 yang mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,091 pada perusahaan TCID terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio (ROE).

Dalam rangka perbaikan ekonomi di Indonesia berdiri lembaga non pemerintah yaitu komite nasional bagi pengelolaan perusahaan yang baik. Surat keputusan menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN juga membuktikan bahwa penerapan GCG diperlukan guna perbaikan ekonomi di Indonesia. Dikeluarkannya peraturan mengenai penerapan GCG pada perusahaan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan dan kontrol dari perusahaan yang ada di Indonesia. Rujukan-rujukan tentang praktik-praktik terbaik sudah tersedia luas. Misalnya, melalui FCGI (Forum For Corporate Governance in Indonesia) untuk rujukan praktik terbaik penerapan manajemen risiko dan komite audit serta melalui *Indonesian Society of Independent Commissioners* (ISICOM) untuk praktik terbaik fungsi dan peran komisaris independen.

Jika *corporate governance* merupakan faktor yang signifikan pada kondisi krisis, maka *corporate governance* tidak hanya mampu menjelaskan perbedaan kinerja antar negara selama periode krisis, akan tetapi juga perbedaan *corporate*

*governance* di tingkat perusahaan masih sangat sedikit dilakukan. Penelitian dampak penerapan *corporate governance* pada kinerja sangat menarik untuk dilakukan pada periode krisis.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan *corporate governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Menurut Berghe dan Ridder (1999), menghubungkan kinerja perusahaan dengan *good governance* tidak mudah dilakukan. Demikian juga dengan Young (2003) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan beberapa hasil penelitian, Berghe dan Ridder (1999) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai pencapaian lemah yang disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers, *et al.* (2003) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang.

Struktur *good corporate governance* memiliki beberapa indikator yang berupa ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan komite audit. Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji keterkaitan antara struktur *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan (Daily *et al.* 1998). *Corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja secara langsung terutama. Di lain pihak menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*, adanya hubungan positif antara

*corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (Darmawati *et al.* 2004, Klapper dan Love, 2002, Mitton, 2002, Van den Berghe dan Ridder (1999).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan *persentase* jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007), sedangkan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, *et.al.* 2006). Fama (1980) menyatakan bahwa dewan direksi merupakan mekanisme pengendalian internal utama yang memonitor manajer. Tiga karakteristik yang mempengaruhi *monitoring* adalah ukuran dewan direksi, komposisi dewan direksi dan struktur kepemilikan direksi (Jensen, 1993).

Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan-perusahaan di Negara lain. Sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris, dan selain itu konflik keagenan dapat terjadi antara manajer dan pemilik dan juga antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.



Struktur kepemilikan saham mampu memengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang dimiliki oleh para pemegang saham. Struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah: (1) konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (*outsider ownership concentration*) dan (2) kepemilikan perusahaan oleh manajer (*manager ownership*).

Untuk mencapai *corporate governance* yang baik, terutama dalam menjalankan prinsip-prinsipnya (akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan, kewajaran), dibutuhkan suatu mekanisme untuk memantau seluruh kebijakan yang diambil. Mekanisme *corporate governance* yang baik dapat mengurangi masalah agensi. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pengawasan keputusan tersebut (Walsd dan Seward, 1990 ), (Bahaudin dan Wijayanti, 2011). Dalam melaksanakan *Corporate governance*, dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Fungsi dan dewan komisaris adalah sebagai suatu sistem yang mengawasi mekanisme manajemen, dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan sehingga dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder International, 2000).

Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal, bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, menelaah kebijakan akuntansi dan

memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi. Penelitian ini mengembangkan penelitian iqbal & Raharja (2012). Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba dan juga nilai perusahaan yang dihitung dengan Tobin's Q. Hal ini memberi bukti bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh Obradovich dan Gill (2013) yang menemukan bahwa komite audit mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Salah satu struktur *corporate governance* yang digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri (Itturiaga dan Sanz, 2000) dalam Faisal (2005). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu struktur untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Salah satunya kepemilikan manajerial.

Sam'ani (2008) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam

mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan. Ukuran dewan komisaris tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Peran dari dewan komisaris menjadi masalah yang diperdebatkan dari pandangan yang berbeda. (Jensen 1993, Yermack, 1996, Hermalin & Weisbach, 2003). Sementara beberapa studi telah menyarankan dewan komisaris yang lebih sedikit lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Lipton & Lorsch, 1992, Jensen 1993, Yermack, 1996, Einsberg, Sundgren, dan Wells 1998, Barnhart & Rosenstein, 1998, Cheng, 2008). Penelitian lain menyarankan dewan komisaris yang lebih besar meningkatkan kinerja perusahaan (Kajola, 2008, Chang & Duta, 2012).

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu indikator penting dalam *corporate governance*, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa tidak adanya tindak kecurangan di dalam perusahaan. Menurut Dewi (2008) untuk mengurangi *agency cost* dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Dengan memberikan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyelaraskan kepentingan dengan pemegang saham. Dengan keterlibatan kepemilikan saham, manajer akan bertindak secara hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan kepemilikan saham, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan.

Penelitian Hermalin dan Weisbach (1991) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan Gedajlovec *et al.* (2009), Uadiale (2010), Larasati (2011) dan Chen *et al.* (2012) menemukan tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menciptakan usaha pengawasan yang besar juga oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Menurut Permanasari (2010) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional maka proses *monitoring* akan berjalan lebih efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam hal manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pihak lain (*stakeholder*). Menurut Slovin dan Sushka (1993) nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat *monitoring* yang efektif. Selain kepemilikan institusional, adanya kepemilikan oleh manajerial juga memengaruhi nilai perusahaan. Morck *et al.* (1988) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Penelitian tersebut menguji hubungan antara kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris terhadap nilai perusahaan.

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang

dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (*agency cost*). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Damsetz dan Lehn (1985) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial yang tinggi mampu mengurangi masalah keagenan. Gil dan Obradovich (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan Darwis (2009) dan Bayrakdaroglu *et al.* (2012) menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Darwis (2009) menyatakan tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan karena kepemilikan saham oleh manajer masih sangat kecil maka manajer belum merasakan manfaat dari kepemilikan tersebut sehingga kemungkinan manajer akan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang berlebihan yang dilakukan manajer, diperlukan pengawasan yang optimal dari pihak investor institusional (kepemilikan saham institusional). Kepemilikan institusional mempunyai peranan penting dalam memonitor manajemen. Salah satu mekanisme pengawasan yang dapat digunakan adalah dengan cara mengaktifkan pengawasan dari para investor institusional yang akan mendorong pengawasan terhadap kinerja manajer (Fama dan Jensen, 1983).

Pada umumnya setiap pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan mereka tepat sebagai alternatif investasi melalui pihak manajemen. Pihak manajemen diharapkan mampu memberikan sinyal positif terhadap para calon investor. Apabila pihak manajemen tidak mampu menampilkan sinyal yang baik tentang nilai perusahaan, maka nilai perusahaan dapat berada diatas atau dibawah nilai yang sebenarnya. Manajer menyampaikan sinyal kepada investor melalui pengaturan struktur modal (Brigham dan Houston, 2011).

Industri manufaktur sebagai salah satu industri terbesar di Bursa Efek Indonesia merupakan sektor pendukung pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang tergabung ke dalam industri manufaktur memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menuntut kinerja perusahaan yang selalu prima agar unggul dalam persaingan.

Pada penelitian sebelumnya juga terdapat perbedaan hasil peneliti antara beberapa penelitian mengenai struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan, dimana sebagian besar variabel struktur kepemilikan yang digunakan adalah kepemilikan manajerial dan institusional. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, dengan menambahkan variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* dikarenakan variabel tersebut juga masih merupakan variabel struktur kepemilikan dan tata kelola yang berhubungan dengan kinerja perusahaan.

Beberapa hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang bermaksud menganalisis pengaruh antara, kepemilikan Institusional,

kepemilikan Manajerial dan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, khususnya sektor perusahaan manufaktur.

Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur adalah jenis usaha yang bergerak disektor *riil* yang memiliki jumlah perusahaan yang paling banyak dibandingkan jenis usaha lainyang terdiri dari beberapa industri. Meskipun terdiri dari berbagai macam industri, perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang serupa. Disamping itu, perekonomian telah menyebabkan perusahaan manufaktur mengalami kesulitan untuk meneruskan usahanya dan memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Periode 2012-2016 dipilih karena merupakan periode yang belum pernah disajikan sebagai bahan penelitian sejenis serta memberikan gambaran terkini keuangan dari sebuah perusahaan.

Manajemen Islam menawarkan perubahan paradigma etis agar manusia lebih dapat memahami dirinya sebagai manusia bertuhan. Sehingga manusia dalam mengelola kehidupannya melalui aktifitas sosial mampu mengemasnya, baik dalam organisasi, lembaga maupun perusahaan yang dalam aktivitasnya di landasi nilai-nilai tauhid dan semata-mata sesuatu tindakan dikerjakan hanya karena Allah SWT. Manajemen islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan islam itu sendiri. Islam harus diikuti secara sempurna dan komprehensif. Islam menuntut kaum muslim untuk mengaktualisasika keislamannya dalam aspek kehidupan. Dalam kehidupan manajemen mereka memiliki manajemen sendiri dimana garis-garis besarnya digambarkan dalam al-Qur'an. Ini semua adalah rambu-rambu dalam bidang manajemen yang harus ditaati oleh setiap muslim.

Berdasarkan latar belakang diatas banyak ketidakkonsistenan ditemukan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi lebih dalam penganalisaan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan sektor manufaktur secara khusus, yang ditentukan dalam variabel struktur *corporate governance* diantaranya Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan manajerial, dan Kepemilikan Institusional. Penelitian ini menguji variabel *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan (Klapper dan Love, 2002) Atas pemikiran diatas maka penelitian ini berjudul:

**“Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instutisional Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan dan Tinjauan dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012-2016)“.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 ?



2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 ?
4. Bagaimana pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 ?
5. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 ?
6. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit secara bersama-sama terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 ?
7. Bagaimana Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan ditinjau dari sudut pandang Islam ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
2. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
3. Mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
4. Mengetahui pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
5. Mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
6. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran dewan komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit secara bersama-sama terhadap kinerja perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
7. Mengetahui Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan ditinjau dari Sudut Pandang Islam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, yaitu berupa manfaat akademis dan manfaat praktis.

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan.
- c. Agar dapat lebih memahami bagaimana memperoleh cara yang efisien dan praktis dalam mengetahui dan memperdalam materi yang telah diberikan melalui penulisan ilmiah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Perusahaan

Bagi pihak internal perusahaan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan finansial khususnya yang terkait dengan struktur kepemilikan modal guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

- b. Bagi Investor

Bagi pihak investor sebagai bahan masukan untuk berinvestasi pada perusahaan yang struktur kepemilikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan bagi emiten sebagai bahan masukan untuk mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja.